

**KONSEP PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MANAJEMEN MUTU
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

DISERTASI

**Disusun untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Doktor Pendidikan Islam pada Sekolah Pascasarjana
Universitas Ibn Khaldun Bogor**



NURYADI WIJIHARJONO

NPM. 09526110055

NIRM. 010. 02.09.1233

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR**

2019 M./1440 H.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Disertasi yang berjudul “Konsep Pendidikan Tinggi Muhammadiyah dan Implikasinya Terhadap Manajemen Mutu di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka” yang disusun oleh:

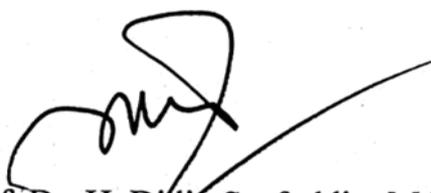
Nama : NURYADI WIJIHARJONO

NPM : 09526110055

NIRM : 010. 02.09.1233

telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam Ujian Komisi Pembimbing pada Program Doktor Pendidikan Islam Program Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Pembimbing



Prof. Dr. H. Didin Saefuddin, MA
Pembimbing I



Dr. H. Hasbi Indra, MA
Pembimbing II

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Disertasi yang berjudul “Konsep Pendidikan Tinggi Muhammadiyah dan Implikasinya Terhadap Manajemen Mutu di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka” yang disusun oleh:

Nama : NURYADI WIJIHARJONO

NPM : 09526110055

NIRM : 010. 02.09.1233

telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam Ujian Tertutup pada Program Doktor Pendidikan Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Pembimbing



Prof. Dr. H. Didin Saefuddin, M.A.
Pembimbing I



Dr. H. Hasbi Indra, M.A.
Pembimbing II

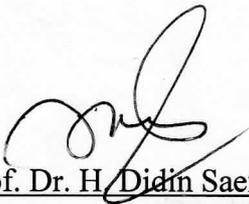
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Disertasi yang berjudul “Konsep Pendidikan Tinggi Muhammadiyah dan Implikasinya Terhadap Manajemen Mutu di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka” yang disusun oleh:

Nama : NURYADI WIJIHARJONO
NPM : 09526110055
NIRM : 010. 02.09.1233

telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam Ujian Sidang Terbuka pada Program Doktor Pendidikan Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Pembimbing



Prof. Dr. H. Didin Saefuddin, M.A.
Pembimbing I



Dr. H. Hasbi Indra, M.A.
Pembimbing II

PENGESAHAN

Disertasi yang berjudul “Konsep Pendidikan Tinggi Muhammadiyah dan Implikasinya Terhadap Manajemen Mutu di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka” yang disusun oleh:

Nama : NURYADI WIJIHARJONO

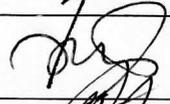
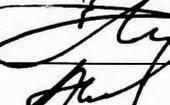
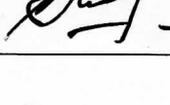
NPM : 09526110055

NIRM : 010. 02.09.1233

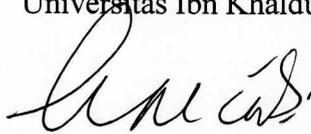
Telah diujikan pada hari Kamis, 22 Agustus 2019 M./21 Dzulhijah 1440 H. dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Pendidikan Islam pada Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Bogor,

Komisi Penguji

No.	Nama	Jabatan	Tanggal	Ttd
1	Dr. H.E. Bahrudin, M.Ag.	Pimpinan Sidang	24/8/19	
2	Prof. Dr. H. Didin Saefuddin, M.A.	Ketua Promotor	19/8 2019	
3	Dr. H. Hasbi Indra, M.A.	Co-Promotor	24/8 2019	
4	Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS	Penguji I	23/09 2019	
5	Prof. Dr. H. Saeful Anwar, M.A.	Penguji II	25/09-2019	
6	H. Adian Husaini, M.Si., Ph.D.	Penguji III	27/9/19	

Diketahui,
Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Ibn Khaldun Bogor



Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS
NIP. 195110211980111002

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Bismilahirrahmanirrahim.

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “Konsep Pendidikan Tinggi Muhammadiyah dan Implikasinya Terhadap Manajemen Mutu di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Bogor, 8 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



Nuryadi Wijiharjono

NPM: 09526110055

ABSTRAK

NURYADI WIJHARJONO. Konsep Pendidikan Tinggi Muhammadiyah dan Implikasinya terhadap Manajemen Mutu di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka. Disertasi. Bogor: Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2018. Pembimbing Prof. Dr. H. Didin Saefuddin, MA dan Dr. H. Hasbi Indra, MA

Tanggung jawab utama sebuah perguruan tinggi adalah menyelenggarakan pendidikan, bukan mendistribusikan pengetahuan. Dalam konteks manajemen mutu, konsep dan implementasi pendidikan tinggi Muhammadiyah merupakan bentuk tanggung jawab Muhammadiyah berhadapan dengan lingkungan institusional yang melingkupi perguruan tinggi Muhammadiyah, agar kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembinaan al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan misi dan tujuan Muhammadiyah.

Pokok permasalahan yang menjadi inti penelitian ini adalah tentang bagaimana konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah, dan bagaimana implementasi konsep tersebut serta implikasinya terhadap manajemen mutu di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA). Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep dan implementasi pendidikan tinggi Muhammadiyah, dan menganalisis implikasi konsep tersebut terhadap manajemen mutu di UHAMKA.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis atas konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah mengacu pada kerangka teori pendidikan Islam, terhadap komponen-komponen yang membentuk sistem tersebut. Berpijak pada konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah tersebut, analisis atas implementasi dan implikasi terhadap manajemen mutu di UHAMKA, menggunakan pendekatan manajemen mutu, modal intelektual, dan teori kelembagaan yang dilakukan secara simultan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan: *Pertama*, dalam garis besarnya konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah mencerminkan pemikiran tentang pendidikan Islam secara holistik, sistematis, dan berkemajuan. Secara keseluruhan, konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah dalam garis besarnya sesuai dengan pendidikan Islam, dan secara normatif sesuai pula dengan kebutuhan masyarakat. *Kedua*, implementasi konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah di UHAMKA tidak secara otomatis berjalan linier. Masih terdapat disparitas kompetensi dosen sehingga mobilisasi sumberdaya intelektual tidak optimal. Secara eksternal, kebijakan pemerintah tidak seluruhnya sesuai dengan konsep tersebut. *Ketiga*, implikasi konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah terhadap manajemen mutu di UHAMKA, berpengaruh pada mutu kelembagaan serta mutu pendidikan al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). Direkomendasikan, supaya siklus manajemen mutu didasarkan dan diarahkan pada jatidiri dan fungsi perguruan tinggi Muhammadiyah. Pencapaian mutu pendidikan AIK, meniscayakan kompetensi dosen agar internalisasi nilai-nilai AIK dapat berlangsung secara objektif dan empiris pada level individu (mahasiswa).

Kata kunci: Konsep Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, Manajemen Penjaminan Mutu, al-Islam dan Kemuhammadiyah.

ABSTRACT

NURYADI WIJIHARJONO. Muhammadiyah Higher Education Concept and its Implication toward Quality Assurance Management of University of Muhammadiyah Prof. DR HAMKA. Dissertation. Bogor: Graduate School of Universitas Ibn Khaldun Bogor. 2018. Promotor: Prof. Dr. H. Didin Saefuddin, MA. Co-promotor: Dr. H. Hasbi Indra, MA.

The main responsibility of a higher education institution is to provide qualified education, not just distribute the knowledges. The concept and the implementation of Muhammadiyah higher education system should be the duty and responsibility of Muhammadiyah organization to suit the higher education with Muhammadiyah mission statement in term of education, research, community services, and internalization of Islam as religion and Kemuhammadiyah as the culture of the Muhammadiyah Islamic organization. The focuses should be the concept, the implementation, and the implication of the concept toward Quality Assurance Management of University of Muhammadiyah Prof. DR HAMKA (UHAMKA).

The qualitative research method used by literature reviews and field study approach. Higher education concept of Muhammadiyah referred to Islamic Education Theory frameworks from scholars, that form components of Muhammadiyah Higher Education Concept. The analysis of implementation implication of this tertiary education quality assurance used some approaches as quality assurance management, intellectual capital, and institutional theory as simultaneously

The study summarized that, first; Muhammadiyah higher education concept reflected holistic, systematic, and progressive Islamic education thoughts. It normatively suitable with the needs of current modern society. Second, The implementation of the conception did not started automatically linear with the needs. Internally found some disparities between faculty staffs to optimally actualize the conception. From the external side, there is a slight gap with the regulation from the government. Thirdly, the implication of higher education concept of Muhammadiyah toward quality assurance management at UHAMKA substantively related with the institutional quality and the quality of al-Islam and Kemuhammadiyah teaching. The quality assurance management activities must be guided and driven by the Muhammadiyah higher education concept. The lecturers should be educators spiritually and intellectually, and internalize al-Islam and Kemuhammadiyah values objectively and empirically. The internalization of al-Islam and Kemuhammadiyah values should be the mover of the culture of quality assurance management of the institution.

Keywords: Muhammadiyah Higher Education Concept, Quality Assurance Management, al-Islam and Kemuhammadiyah.

خلاصة

نوريادي ويجيهارجونوا, المنهج التربويّ العالي للمحمّدية وأثرها لإدارة الضمان بجامعة المحمّدية دكتور حمكا, أطروحة دكتوراة, بوغور, 2018, جامعة ابن خلدون برنامج الدراسات العليا ودكتوراة على إشراف الأساذ الحاج دكتور ديدين سيف الدين, والأساذ الحاج دكتور حسبي إيندراى.

من المسؤوليات الأساسيات في التعليم العالي هي العملية التربوية وليست إيصال المعرفة فقط. وفي سياق إدارة الضمان هي مفهوم وتنفيذ التربوي العالي للمحمّدية مسؤولية معالجة البيانات المؤسسية التي تشمل لجميع الكلية المحمّدية من التعليمات, والبحوث, والخدمات المجتمعات وبناء على التربيّات الإسلاميات ومناسبا على رسالة المحمّدية الخصوصية.

المشكلة الرئيسية التي أصبحت جوهر هذا البحث حول كيفية مفهوم التعليم العالي لجامعة المحمّدية, وكيفية تنفيذ هذه المغاهيم, فضلا عن الأثار المترتبة على إدارة الضمان في جامعة المحمّدية دكتور حمكا, وفي حين أن الغرض من هذا البحث تحليل مفهوم وتنفيذ التعليم العالي للمحمّدية, وتحليل اثار المترتبة على هذا المفهوم نحو إدارة الضمان بجامعة حمكاز

يستخدم هذا البحث بأساليب نوعية في مكتبة الدراسات والعمل الميداني, تحليل بناء على مفهوم التعليم العالي للمحمّدية نظرية الإطار يشير الى التربية الإسلامية, ضد العناصر التي تشكل النظام إستناداً الى مفهوم التعليم العالي للمحمّدية. التحليل على مدر التنفيذ والأثار المترتبة على نحو إدارة الضمان بجامعة حمكا باستخدام نهج إدارة الضمان, رأس عملية الفكري, ومناهج المنظمات التي تتم في وقت واحد.

خلاصة من هذا البحث, أولاً في الخطوط العريضة لمفهوم العالي للمحمّدية يعكس تفكير التربية الإسلامية شاملاً ترتيباً للمستقبل. وعلى حسب الكلي مفهوم العالي من المحمّدية في المخطط وفقاً للتعليم الإسلامي والأساس المعياري وفقاً لاحتياجات المجتمع بشكل عام. ثانياً, تنفيذ مفهوم التعليم العالي من المحمّدية لا تلقائياً تشغيل خطي داخلياً, هناك لا يزال بعض الأساتيد كفاءة لتعبئة الموارد محاضر حتى لا يكون محدوداً بالمفهوم الملكية الفكرية يمكن تنفيذ على النحو الإمثال. ومن باب الخارجية هناك ليست سياسة الحكومة تماماً وفقاً لهذا المفهوم. ثالثاً, يتعامل المترتبة على مفهوم التعليم العالي مؤخرًا ضد إدارة الضمان جامعة حمكا النوعية المؤسسية الموضوعية المباشرة. ونوعية التعليم الإسلامي والمحمّدية ينبغي على أساس جميع الأنشطة داغل دورة إدارة الضمان مؤجها بهوية أو شخصية على التعليم العالي للمحمّدية. أما الغرض الاساسي للتعليم السلامي والمحمّدية (AIK) يفترض إستعداد المحاضرين كمتقنين روحياً وفكرياً. حتى تتمكن من إستيعاب القيم موضوعياً وتجريبياً أن يكون القوة الدافعة لنوعية التعليم العالي للمحمّدية.

الكلمات المفتاحيات: المنهج التعليم العالي, إدارة الضمان, التعليم الإسلامي والمحمّدية

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	س	s	ل	L
ب	B	ش	Sy	م	M
ت	T	ص	Sh	ن	N
ث	Ts	ض	<u>d</u>	و	W
ج	J	ط	<u>t</u>	ه	H
ح	<u>H</u>	ظ	<u>z</u>	ء	'
خ	Kh	ع	'	ي	Y
د	D	غ	gh		
ذ	Dz	ف	f		
ر	R	ق	Q		
ز	Z	ك	k		

Catatan:

1. Konsonan bersyaddah ditulis rangkap, seperti kata: “رَبَّنَا”, ditulis = Rabbana
2. Vokal panjang (madd) fathah (baris diatas), kasra (baris di bawah) dan dhammah (baris di depan), ditulis a, i, u misalnya kata:

مَاتَ ditulis : Māta

قِيلَ ditulis :Qīla

يَمُوتُ ditulis : Yamūtu

3. Diftong ditulis: أَوْ = au, أُو = u, أَيَّ = ai, إِي = i
4. Kata sandang alif dan lam (ال), baik diikuti oleh huruf Qomariyah maupun huruf Syamsiyah, ditulis “al” di awalnya, misalnya:

النِّسَاء = al-Nisa'

الْمُؤْمِنُونَ = al-mu'minun

5. Ta' marbutah (ة), bila terletak diakhir kalimat ditulis: h, seperti البقرة
ditulis: al-Baqarah. Bula terletak di tengah kalimat, ditulis
"t", misalnya زَكَاةَ الْفِطْرِ ditulis: zakatal-fitrah
6. Penulisan kalimat Arab di dalam kalimat Indonesia ditulis menurut
tulisanannya, misal: وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis: *wa Allahu khair al-raziqin*.

B. Pedoman Transliterasi Istilah Khusus

Teks Arab	Sesuai EYD	Yang Digunakan
al-Qur'an	Al-Qur'an	al-Qur'an
Alaihissalam	as.	a.s.
Adzab	Azab	Azab
Akhlaq	Akhlak	Akhlak
Aqidah	Akidah	Akidah
da'wah	Dakwah	Dakwah
dha'if	Dhaif	dha'if
Fiqh	Fikih	Fikih
Hadits	Hadis	Hadits
Haqiqat	Hakikat	Hakikat
Husayn	Husein	Husein
Ibn	Ibnu	Ibn
jama'ah	Jamaah	Jamaah
jum'at	Jumat	jum'at
Madzhab	Mazhab	Mazhab
Makkah	Mekkah	Makkah
Madinah	Medinah	Madinah
mu'amalat	muamalah	mu'amalah
mu'jizat	Mukjizat	Mukjizat
mu'min	Mukmin	Mukmin
Musyawat	musyawarah	Musyawah
ru'yat	rukyyat, rukyyah	Rukyyah
Radhiyallahu anhu	ra.	r.a.
Shahih	Sahih	Shahih
Shalat	Salat	Shalat
Surat	surat, surah	Surat
syari'at	syariat, syariah	syariat, syariah
subhanahu wa ta'ala	SWT	S.W.T.
shallallahu alaihi wa sallam	SAW	S.A.W.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Disertasi ini merupakan penelitian tentang konsep dan implementasi pendidikan tinggi Muhammadiyah serta implikasinya terhadap manajemen mutu di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA). Secara historis, konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah merupakan kesinambungan gagasan dan pemikiran sejak masa awal berdirinya Muhammadiyah. Ide untuk mendirikan Universitas Muhammadiyah, muncul pertama kali pada tahun 1920, dalam sebuah rapat yang langsung dipimpin oleh KH Ahmad Dahlan. Dalam konteks itu, Universitas Muhammadiyah merupakan aktualisasi dari pemikiran visioner tentang pendidikan tinggi Islam yang holistik, sistematis, dan berkemajuan.

Konsep dan implementasi pendidikan tinggi Muhammadiyah serta implikasinya terhadap manajemen mutu, menarik untuk dikaji. Dibalik pemikiran dan aksi Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi, tersimpan pergumulan cita-cita keumatan dan kebangsaan yang jarang diungkap. Kondisi internal dan eksternal, baik lokal, nasional maupun internasional, telah mempengaruhi konsep dan implementasi pendidikan tinggi Muhammadiyah. Tekanan lingkungan institusional yang melingkupi perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM), memaksa PTM untuk beradaptasi karena terkait dengan eksistensi dan legitimasi.

Dalam ketegangan orientasi semacam itu, refleksi mendasar atas konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah justru dibutuhkan, karena berhubungan langsung dengan manajemen mutu PTM. Apalagi jika konsep mutu dipahami secara kurang tepat, sehingga manajemen mutu hanya sekedar instrumen teknis-administratif, yang didukung oleh analisis statistik disertai dengan setumpuk dokumen. Padahal dalam manajemen modern, termasuk TQM, penggerak mutu yang sesungguhnya adalah budaya organisasi. Konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah seharusnya menjadi acuan utama dalam membangun budaya mutu PTM, yang diawali dengan bagaimana mentradisikan akhlak akademik, seperti berperilaku jujur dan sederhana.

Dalam menuliskan itu semua, saya merasa beruntung dan berterang budi kepada:

1. Dr. H.E. Bahruddin, M.Ag., Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor, beliau merupakan pimpinan sidang dalam ujian sidang terbuka promosi doktor, yang mampu menghidupkan suasana. Ketika melakukan penelitian ini pun, melalui Pak Kyai Didin, beliau pula yang mengizinkan untuk memperpanjang waktu penulisan disertasi.
2. Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS., Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor. Berkat kesabaran dan caranya yang begitu rupa, membuat saya menyadari bahwa beliau adalah seorang pendidik, seorang guru, dalam arti yang sebenarnya. Beliau tahu dan memahami kesulitan yang melilit muridnya, sejak awal saya masuk menjadi mahasiswa UIKA.
3. Prof. Dr. H. Didin Saefuddin, MA., selaku Ketua Promotor dan Dr. H. Hasbi Indra, MA., sebagai Co-promotor. Beliau berdua, dengan caranya masing-masing, telah memberikan motivasi dan saran-saran penting, yang memungkinkan saya menyelesaikan disertasi ini.
4. H. Adian Husaini, M.Si, Ph.D., Ketua Program Doktor, Program Studi Pendidikan Islam, Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor.
5. Dr. H. E. Mujahidin, M.Si., Sekretaris Program Doktor, Program Studi Pendidikan Islam, Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor.
6. Prof. Dr. H. Saeful Anwar, MA., selaku Penguji Ahli.
7. Seluruh dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor, terutama Dr. H. Ibdalsyah, MA; dan staf sekretariat, terutama Sdr. Ahmad Mukhsinuddin, SHI., M.E., Sdr. Hendri Walika, S.E., M.Pd., dan Sdr. Arbiansyah.
8. Keluarga besar UHAMKA, terutama Prof. Dr. H. Suyatno, Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, dan Dr. Zamah Sari, yang telah mendukung secara moril dan materil sehingga turut melancarkan semua tahapan studi.

9. *Kagem Simbok*, Ibu Ponikem Wijiharjono, dan almarhum Bapak Teguh Wijiharjono, kedua adikku, *denok* Dian dan *denok* Tekah; keluarga besar almarhum Ibu Latifah Nartam dan almarhum Ahmad Nartam; terima kasih atas do'a dan semua pengorbanannya.
10. Istri saya, Maghfira Damayanti, yang selalu sabar, dan kedua anak saya, Taqiy dan Alisha, yang belum mengerti tentang disertasi, namun dengan caranya sendiri, keduanya telah memberikan inspirasi besar untuk segera membereskan studi.

Bogor, Agustus 2019

Nuryadi Wijiharjono

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi masalah.....	9
C. Pembatasan dan Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Penelusuran Hasil Penelitian yang Relevan	14
H. Kerangka Pemikiran	17
I. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II	
KONSEP PENDIDIKAN TINGGI ISLAM	23
A. Tonggak Sejarah Pendidikan Tinggi Islam	23
B. Definisi Pendidikan Tinggi Islam.....	25
C. Komponen-komponen Pendidikan Tinggi Islam	29
1. Tujuan Pendidikan Tinggi Islam	30
2. Kurikulum Pendidikan Tinggi Islam	36
3. Manajemen Pendidikan Tinggi Islam.....	50
4. Pendidik dalam Pendidikan Tinggi Islam.....	58
5. Mahasiswa dalam Pendidikan Tinggi Islam.....	66

6. Penelitian dalam Pendidikan Tinggi Islam	72
7. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Islam	77
8. Kegiatan dalam Pendidikan Tinggi Islam.....	90
9. Pembiayaan dalam Pendidikan Tinggi Islam	96
 BAB III	
KONSEP PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH	
DAN IMPLEMENTASINYA DI UHAMKA.....	103
A. Konsep Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.....	103
1. Sejarah Pendidikan Tinggi Muhammadiyah	103
2. Definisi dan Fungsi Pendidikan Tinggi Muhammadiyah	106
3. Komponen Pendidikan Tinggi Muhammadiyah	109
B. Implementasi Konsep Pendidikan Tinggi Muhammadiyah	
di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA).....	162
1. Tentang UHAMKA.....	162
2. Kegiatan Pendidikan Al-Islam dan	
Kemuhammadiyah di UHAMKA.....	165
 BAB IV	
IMPLIKASI KONSEP PENDIDIKAN TINGGI	
MUHAMMADIYAH TERHADAP MANAJEMEN MUTU	
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA	224
A. Implikasi terhadap Mutu Kelembagaan UHAMKA	224
B. Implikasi terhadap Mutu Pendidikan/Pembinaan AIK-UHAMKA.....	236
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	255
B. Rekomendasi.....	257
DAFTAR PUSTAKA	258
LAMPIRAN	274

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel III.1 Implementasi Komponen Tujuan	167
Tabel III.2 Implementasi Komponen Kurikulum	172
Tabel III.3 Distribusi al-Islam dan Kemuhammadiyah (Sebelum Revisi 2014).....	175
Tabel III.4 Materi Islam Untuk Disiplin Ilmu (Sebelum Revisi 2014)	177
Tabel III.5 Distribusi al-Islam dan Kemuhammadiyah (Revisi 2014)	180
Tabel III.6 Materi Islam Untuk Disilin Ilmu (Revisi 2014)	180
Tabel III.7 Materi Pendidikan Agama Islam dan Kemuhammadiyah (Revisi 2014).....	183
Tabel III.8 Implementasi Komponen Tata Kelola dan Manajemen	199
Tabel III.9 Kompetensi Dasar Pendidik/Dosen PTM	204
Tabel III.10 Implementasi Komponen Pendidik/Dosen	206
Tabel III.11 Implementasi Komponen Mahasiswa	209
Tabel III.12 Implementasi Komponen Penelitian	213
Tabel III.13 Implementasi Komponen Pembiayaan	216
Tabel III.14 Proporsi Pembiayaan Pendidikan Tinggi di UHAMKA	219

Daftar Lampiran

	Halaman
III.1 Tanfidz Keputusan Mukhtamar Satu Abad Muhammadiyah (Mukhtamar Muhammadiyah Ke 46), Yogyakarta, 20-25 Rajab 1431 H / 3-8 Juli 2010 M. Tentang Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah.....	274
III.2 Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Ped/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.	286
III.3 Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET.1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pemimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.	299
III.4 Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 058/Kep/I.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.....	308

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis, pendirian perguruan tinggi Islam di Indonesia menyimpan pergumulan pemikiran yang berjalın-kelindan dengan perjuangan umat Islam dalam meraih kemerdekaan. Berkat kemerdekaan itulah, maka umat Islam dapat mengakses pendidikan tinggi. Menurut Azra, “mobilitas pendidikan dan intelektual hampir secara progresif menghasilkan mobilitas ekonomi dan sosial. Mereka yang beroleh pendidikan, khususnya perguruan tinggi, dapat mengisi berbagai lapangan kerja pada beragam sektor, yang sebelumnya tidak pernah diduduki kaum santri.”¹ Secara kelembagaan, perguruan tinggi (universitas) telah berkontribusi dalam penyediaan sumber daya manusia (*human capital*), penemuan-penemuan (*inventions*), dan perbaikan sosial ekonomi masyarakat.²

Menurut Wan Daud, “pendidikan efektif terjadi di tingkat dewasa, yaitu institusi pendidikan tinggi dalam makna moderennya.”³ Dalam sistem pendidikan tinggi, penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, merupakan dua entitas yang melekat dan tidak dapat dipisahkan. Seperti dua sisi dari satu keping mata uang yang sama. Mendirikan sebuah universitas, satu hal bergantung pada keluasan institusi dan kerja organisasi, dan hal lainnya terlebih jika, konsep sebuah universitas pun tidak tersedia dalam budaya dan lingkungan organisasi.⁴

Perguruan tinggi yang pada umumnya berbentuk universitas, menurut Winarno, merupakan sebuah lembaga pembangunan yang karena mempunyai

¹ Azyumardi Azra, “Kelas Menengah Baru Muslim Indonesia, Sebuah Survei ke Arah Format Dakwah Alternatif” dalam Ilham Mundzir dan Faozan Amar (Editor), *Muhammadiyah dan Dakwah Pencerahan untuk Masyarakat Kelas Menengah*. Jakarta: Al-Wasat, 2013, hlm. 38.

² M. F. Dinerstein, C. M. Hoxby, J. Meer, dan P. Villanueva, “Did the Fiscal Stimulus Work for Universities?” dalam Jeffrey R. Brown dan Caroline M. Hoxby (Eds), *How the Financial Crisis and Great Recession Affected Higher Education*, Chicago: The University of Chicago Press, 2015, hlm. 266.

³ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Islamisasi Ilmu-ilmu Konstemporer dan Peran Universitas Islam dalam Konteks Dewesternisasi dan Dekolonisasi*, Bogor: Universitas Ibn Khaldun dan UTM, 2013, hlm. 11.

⁴ John W. Meyer dan Francisco O. Ramirez, David John Frank, Evan Schofer, “Higher Education as an Institution”, (Working Paper) Freeman Spogli Institute of Stanford University and the Spencer Foundation, 31 Desember 2005.

peran spesifik memerlukan pengelolaan profesional, yang tidak mudah dipahami oleh mereka yang bersinggungan dengan universitas hanya secara okasional atau insidental. Keterbatasan kemampuan dan kemauan, menyebabkan peran dan persyaratan khusus itu terdesak ke samping. Sebagai ganti yang menonjol adalah konsideran lain, yang umumnya tidak seberapa relevan dengan aspirasi pengembangan sumber daya manusia terdidik untuk pembangunan. Ada yang dominan bermotif politik, motif kedaerahan, profit komersial, dan lain-lain.⁵

Perkembangan institusi pendidikan, sebagaimana dikemukakan oleh Sallis, terjadi seperti dalam siklus bisnis. Menurut Sallis, terdapat tiga fase perkembangan: kelahiran, pertumbuhan, dan kedewasaan. Pada fase ketiga, yakni kedewasaan (*maturity*), sebuah institusi berada pada fase yang paling kritis, di mana ia bisa berkembang tetapi juga bisa tumbang. Dalam fase paling krusial ini, solusi terbaik adalah melakukan inovasi dan proaktif dalam merespon serta beradaptasi dengan pasar.⁶ Hal semacam inilah yang pernah dikhawatirkan oleh Naquib al-Attas ketika pendidikan tinggi tunduk kepada kepentingan pasar, sebagaimana diungkapkan oleh Wan Daud sebagai berikut: “Munculnya suara-suara yang menuntut agar materi-materi dan tujuan pendidikan harus dimodifikasi sesuai dengan tuntutan pasar dan industri serta peluang kerja menjadi semakin berpengaruh dan diterima di sebagian dunia Muslim.”⁷

Tanggung jawab utama sebuah universitas adalah menyelenggarakan pendidikan, bukan mendistribusikan pengetahuan. Tekanan institusional pendidikan tinggi dan beban dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, cenderung mengabaikan hakikat pendidikan. Hubungan dosen-mahasiswa idealnya seperti hubungan guru-murid, sebagaimana terdapat dalam sejarah universitas Islam atau pada pendidikan pesantren hari ini. Menurut Al-Attas, seperti dikutip oleh Wan Daud, “kedudukan seseorang tidak ditentukan

⁵ Surakhmad, Winarno, *Pendidikan Nasional; Strategi dan Tragedi*. Jakarta: Kompas, 2009. hlm. 391.

⁶ Edward Sallis, *Total Quality Management and Education*, London: Kogan Page, 1993, hal. 80.

⁷ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Sjed M Naquib al-Attas*, Bandung: Mizan, 2003, hlm. 227.

oleh kriteria manusia pada kekuasaan, kekayaan, dan keturunan, tetapi menggunakan kriteria al-Qur'an pada ilmu, kecerdasan dan kebajikan.”⁸

Ketidakjelasan orientasi pendidikan tinggi, menurut Fadjar dan Effendy, sejak dulu sampai kini tercermin dalam sosok perguruan tinggi kita yang sebetulnya sudah sadar akan masa depan, namun belum mampu menerjemahkan kesadaran itu dalam bentuk perumusan antisipasi masa depan yang cermat. Akibatnya disiplin ilmu dan bidang studi yang dikembangkan kurang bisa menjawab persoalan pembangunan masa yang akan datang.⁹

Munculnya istilah universitas riset (*research university*), universitas pendidikan (*teaching university*), universitas kewirausahaan (*entrepreneurial university*),¹⁰ dan istilah lainnya menunjukkan kurang dipahaminya hakikat universitas.¹¹ Seperti dikemukakan oleh Brodjonegoro, “tata kelola pendidikan terjebak ke dalam mekanisme administratif yang justru menghilangkan hakikat pendidikan. Berbagai peraturan perundangan yang ada mengenai pendidikan di semua jalur dan jenjang telah menjadikan pendidikan kegiatan administratif yang birokratis, penuh pengaturan dalam setiap aspek, tak ada otonomi dan akuntabilitas, tak ada inovasi dan kreativitas, tak ada kepercayaan terhadap guru dan dosen.”¹²

Perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM), seperti juga perguruan tinggi lainnya yang diselenggarakan oleh masyarakat, tengah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Otonomi perguruan tinggi swasta dalam pengembangan dosen, telah terbelenggu oleh sebagian kebijakan pendidikan tinggi yang dikaitkan dengan akreditasi. Misalnya peraturan tentang rasio dosen-mahasiswa, tuntutan kualifikasi, kompetensi maupun jabatan akademik dosen. Implikasi dari kebijakan koersif ini telah menimbulkan biaya sosial dan ekonomi biaya tinggi di masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

⁸ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Islamisasi Ilmu-ilmu Konstemporer...*, hlm. 68.

⁹ A. Malik Fadjar dan Muhadjir Effendy, *Dunia Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan*, Malang: Pusat Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hlm. 23.

¹⁰ Ronald Barnett dan Soren Bengtson, *Universities and Epistemology: From a Dissolution of Knowledge to the Emergence of a New Thingking. Education Sciences*, Vol. 7, No. 38, Maret 2017, hlm. 1-12.

¹¹ Tejojuwono Notohadiprawiro, “Universitas Pendidikan, Universitas Penelitian, Universitas Pelayanan Masyarakat, Ataukah Universitas Tridarma?”, *Faferta UGM*, 1997. http://faferta.ugm.ac.id/download/publikasi_dosen/pdf, diakses April 2018.

¹² Satryo Soemantri Brodjonegoro, “Pendidikan Bukan Pencitraan”, *Kompas*, 09 Maret 2015.

Merujuk penelitian Arum dan Roksa, seperti disebutkan oleh Timothy Reese Cain, ranking perguruan tinggi dan nilai akreditasi tidak selalu menggambarkan mutu pendidikan tinggi. Lebih dari 40 persen mahasiswa dari perguruan tinggi bereputasi di Amerika Serikat, tidak memiliki kompetensi dasar sebagai mahasiswa program sarjana, terutama dalam keterampilan membaca, menulis, dan berpikir kritis.¹³ Menurut Husaini, “proses pendidikan yang lebih mengedepankan bahkan memaksakan standar proses tertentu dibandingkan dengan mengedepankan hasilnya, seharusnya sudah patut ditinjau kembali. Sebab, yang terjadi saat ini para pelajar dan mahasiswa lebih mengejar formalitas ijazah dan gelar, ketimbang keilmuan dan akhlak mulia.”¹⁴

Dari segi kuantitas, Perguruan Tinggi Islam (PTI) di Indonesia menempati peringkat teratas atau terbanyak jumlahnya di dunia.¹⁵ Tetapi secara kualitas, peringkat PTI masih berada pada peringkat bawah.¹⁶ Oleh karena itu, Azra menegaskan, “mengingat amat pentingnya peran pendidikan dalam mobilitas intelektual, ekonomi, sosial dan keagamaan, tantangan dan tuntutan ke depan adalah meningkatkan mutu dan keterjangkauan...”¹⁷ Masalahnya, mutu dan keterjangkauan merupakan dua hal yang berbeda. Mutu terkait dengan hasil (*outcomes*), sedangkan keterjangkauan terkait dengan biaya.

Mutu bukan sekedar definisi yang terukur secara obyektif, tetapi mutu juga mencakup definisi dan orientasi personal subyektif (*transcendence-oriented*).¹⁸ Sistem penjaminan mutu maupun akreditasi terdapat beragam model, bergantung pada kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan struktur

¹³ Timothy Reese Cain, “Thinking Critically about Undergraduate Education”, Review buku Richard Arum dan Josipa Roksa, *Academically Adrift: Limited Learning on College Campuses*, Chicago: University of Chicago Press, 2011. *Thought & Action*, Fall 2011 [Online], <http://www.nea.org/archive/50459.htm>, diakses Juni 2018.

¹⁴ Adian Husaini, *Pendidikan Islam, Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya 2045*, Depok: Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa, 2018, hlm. 44.

¹⁵ Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/03/08/nkw011-jumlah-perguruan-tinggi>, diakses Maret 2018.

¹⁶ List Peringkat 100 Besar Perguruan Tinggi Indonesia Non-Politeknik Tahun 2017. <http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2017/pdf>, diakses Maret 2018.

¹⁷ Azyumardi Azra, “Kelas Menengah Baru Muslim Indonesia...,” hlm. 41.

¹⁸ Berings, Dries. 2010. Reflection on quality culture as a substantial element of quality management in higher education. Hogeschool-Universiteit Brussel. <http://www.aic.lv/bolona/2010/Sem09-10/EUAQUAforum4/III.7-Berings.pdf>, diakses April 2018.

badan akreditasi terpusat atau terdesentralisasi, regional atau internasional.¹⁹ Meskipun belum terdapat keseragaman model, tetapi di antara anggota negara-negara maju ada kesamaan kepentingan terhadap penjaminan mutu dan akreditasi, terutama menyangkut perdagangan jasa pendidikan global.²⁰

Menurut Edward Sallis, dalam mengembangkan manajemen mutu pendidikan tinggi, perguruan tinggi dapat menggunakan model *total quality management* (TQM).²¹ Namun, yang menentukan mutu bukan penggunaan instrumen TQM, melainkan terutama adalah budaya mutu, budaya organisasi.²² Dalam konteks itu, budaya organisasi PTM harus dibangun berdasarkan konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah, yang dimulai dari bagaimana mentradisikan nilai-nilai akhlak akademik, seperti berperilaku jujur, sederhana, dan tidak takabur dengan ilmu. “Bagaimanapun banyak pengetahuan yang telah kita dapat, masihlah sedikit yang telah kita ketahui, dibandingkan dengan yang belum kita ketahui,” kata Buya Hamka.²³ Hal ini sesuai dengan firman Allah S.W.T. dalam al-Qur’an Surat Al Isra [17] ayat 85:

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

Tidaklah Kami berikan kepadamu ilmu, kecuali hanyalah sedikit.

Tindakan plagiasi atau plagiarisme misalnya, jelas merupakan perilaku yang berlawanan dengan akhlak akademik, dan oleh karena itu tidak bermutu. Jika akhlak akademik dapat terbangun, maka akan menjadi kekuatan penggerak budaya organisasi PTM. Dalam membangun budaya organisasi, tidak banyak institusi maupun organisasi mampu beradaptasi berhadapan dengan tekanan institusionalnya. PTM semakin meluas, dan untuk sebagian, diiringi pula dengan

¹⁹ Tricia Ryan, “Quality Assurance in Higher Education: a Review of Literature”, *Higher Learning Research Communications*, Vol. 5, No. 4, Desember 2015, [Online], <http://dx.doi.org/10.18870/hlrc.v5i4.257>, diakses Mei 2018.

²⁰ Dirk Van Damm, *Trends and Models In International Quality Assurance and Accreditation*, OECD: 2002, [Online], <http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/pdf>, diakses Mei 2018.

²¹ Edward Sallis, *Total management in Education*. Taylor & Francis e-Library, 2005.

²² Dries Berings. 2010. Reflection on quality culture as a substantial element of quality management in higher education. Hogeschool-Universiteit Brussel. <http://www.aic.lv/bologna/2010/Sem09-10/EUAQUAforum4/III.7Berings.pdf>, diakses April 2018.

²³ “Pidato Buya Hamka pada upacara peresmian Perguruan Tinggi Islam Jakarta, tahun 1951,” dimuat kembali dalam Hamka: *Renungan Tasauif*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985, hlm. 66.

peningkatan mutu kelembagaannya. Nakamura (2015) menyebutkan bahwa sudah terdapat beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah yang cukup kompetitif dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri dan swasta Kristen dan Katolik.²⁴ Namun, capaian prestasi tersebut belum mencukupi dibandingkan dengan jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah dan misi yang seharusnya dipikul.

Peningkatan mutu pendidikan tinggi, termasuk peningkatan mutu dosen, bukan sekedar melaksanakan undang-undang dan peraturan pemerintah,²⁵ melainkan terutama dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan Islam. Menurut Ahmad Tafsir, “definisi pendidikan Islam pada dasarnya adalah ‘pendidikan yang berdasar Islam’ maka pendidikan Muhammadiyah dapat disebut sebagai pendidikan Islam.”²⁶ Dengan demikian, perguruan tinggi Muhammadiyah dapat disebut sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam.

Manajemen mutu perguruan tinggi Muhammadiyah seharusnya menggambarkan mutu kelembagaan dan mutu pendidikan al-Islam dan Kemuhammadiyahan, sesuai dengan konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah. Peningkatan mutu perguruan tinggi Muhammadiyah dapat dimulai dari peningkatan mutu dosennya. Latar belakang pendidikan dan pengalaman dosen yang beragam, harus disamakan pandangannya melalui pemahaman tentang konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah. Di sinilah pentingnya memahami konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah dan implikasinya terhadap manajemen mutu perguruan tinggi Muhammadiyah.

Mengkaji pendidikan tinggi Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dari sejarah Muhammadiyah dan pemikiran tokoh pendirinya, yaitu KH Ahmad Dahlan. Namun, seperti pengalaman Alfian ketika melakukan penelitian disertasi tentang Muhammadiyah, ia mengungkapkan; “Sayang sekali, Kijai Dahlan tidak meninggalkan tulisan sama sekali mengenai kehidupan dan gagasan-gagasannya. Tugas itu bahkan lebih sulit karena tampaknya tidak ada seorang Belanda atau

²⁴ Mitsuo Nakamura , "Personal Impressions on Muktamar NU and Muktamar Muhammadiyah with their Respective Themes— Islam Nusantara (NU) and Islam Berkemajuan (Muhammadiyah)" at UAI, Jakarta, August 18, 2015 (Revised August 23, 2015).

²⁵ Lihat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

²⁶ Ahmad Tafsir, *Konsep Pendidikan Formal dalam Muhammadiyah*, Disertasi Doktor pada Fakultas Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 1987. Lihat juga: Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islami*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 33.

sarjana Barat pun yang menulis secara sungguh-sungguh mengenai dirinya.”²⁷ Selama melakukan penelitian, Alfian tidak berhasil menemukan data ilmiah tentang pemikiran Dahlan yang sangat ia butuhkan:

“Persoalannya menjadi semakin buruk, karena pemerintah kolonial belanda yang memiliki reputasi tinggi juga terlihat sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap tokoh tersebut dan ajaran-ajarannya mengenai keyakinan agama. Dan, saya tidak berhasil mendapatkan laporan-laporan ilmiah apa pun mengenai dirinya yang dilakukan oleh pegawai-pegawai negeri Belanda, terutama pegawai *Inlandsche Zaken*—sebuah kantor yang terkenal karena uraian-uraiannya yang menyeluruh dan panjang lebar mengenai Islam dan umat Muslim Indonesia.”²⁸

Dengan keterbatasan tersebut, Alfian mencoba dan berhasil melakukan rekonstruksi terhadap pemikiran Kyai Dahlan melalui apa yang dipraktikannya bersama Muhammadiyah, dan pengaruh kegiatan-kegiatan tersebut di masyarakat. Pernyataan tentang metode yang ia gunakan dalam menulis disertasi di Universitas Wisconsin, Amerika Serikat, menarik untuk disimak:

“Meskipun terdapat kekurangan nyata ini, situasinya tidak mengecewakan sama sekali. Saya kira, kita dapat merekonstruksi arti penting yang sebenarnya dari tokoh Kijai Dahlan sebagai seorang modernis Muslim dengan menghubungkannya dengan masyarakat di tempat dia dilahirkan dan dibesarkan, dengan pendidikan dan perkembangan intelektualnya, dan dengan kegiatan-kegiatannya yang kita ketahui.”²⁹

Dalam konteks konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah, kutipan pernyataan di atas dapat penulis jadikan dalil dalam penelitian disertasi ini; jika tidak ditemukan secara konseptual tentang dan terkait dengan pendidikan tinggi Muhammadiyah, penulis akan merujuk pada apa yang dipraktikkan di perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM), terutama yang dipraktikkan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA). Asumsinya adalah, di dalam praktik pendidikan terdapat konsep pemikiran tentang pendidikan. Dan, inilah saya kira, di antara metode yang dapat digunakan untuk mengungkap dan merekonstruksi konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah.

²⁷ Alfian, *Politik Kuam Modernis: Perlawanan Muhammadiyah terhadap Kolonialisme Belanda*, (terjemahan Machnun Husein), Jakarta: Al-Wasat Publishing House, 2010, hlm. 149.

²⁸ Alfian, *Politik Kuam Modernis: Perlawanan Muhammadiyah...*, hlm. 149.

²⁹ Alfian, *Politik Kuam Modernis: Perlawanan Muhammadiyah...*, hlm. 150.

Sejak masa kepemimpinan KH Ahmad Dahlan (1868-1923), Muhammadiyah sudah bercita-cita ingin mendirikan universitas. Gagasan tersebut disampaikan oleh Haji Hisyam, Ketua Bagian Sekolah dan Pengajaran Muhammadiyah, pada tahun 1920.³⁰ Kepentingan strategis dari pendidikan tinggi, menurut Wan Daud, semakin tampak di masa kini.³¹ Oleh karena itu, kurangnya memahami konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah dapat menimbulkan disorientasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, terhadap mayoritas pendidik, dalam hal ini adalah dosen, pada program studi non-kependidikan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA) yang tidak pernah memperoleh filsafat pendidikan Islam maupun ilmu pendidikan Islam, pemahaman mereka terhadap konsep pendidikan Islam tentu tidak akan mencukupi.

Dalam proses pembelajaran di UHAMKA, program integrasi keilmuan Islam tidak dapat berjalan secara optimal karena hanya dilaksanakan secara terbatas oleh dosen pengampu kelompok mata kuliah al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). Dosen di luar AIK agaknya kurang dikenalkan dengan pendekatan epistemologi Islam. Padahal konsep pengetahuan dalam Islam berbeda dengan konsep Barat. Dalam pandangan Islam, semua pengetahuan datang dari Allah. “Sebagian diwahyukan kepada orang yang dipilih-Nya, dan sebagian lain diperoleh manusia dengan menggunakan indera, akal, dan hatinya.”³² Pemahaman dosen terhadap konsep epistemologi Islam akan banyak membantu dalam praktik pendidikan Islam.

Idealnya, pengembangan pembinaan al-Islam dan Kemuhammadiyah yang, menjadi ciri khas pendidikan Muhammadiyah, terintegrasi dengan manajemen mutu kelembagaan. Pembinaan AIK tidak cukup diberikan hanya pada proses pembelajaran di ruang kelas. Bahkan, fungsi pembinaan AIK akan lebih efektif dan lebih bermakna bila dilaksanakan secara terintegrasi pula dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Karena fungsi perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) tidak terbatas hanya pada fungsi pendidikan, tetapi

³⁰ *Islam Berkemajuan, Kiai Ahmad Dahlan dalam Catatan Pribadi Kiai Syuja* Jakarta: Al-Wasath Publishing House, 2009. hlm. 97-98.

³¹ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Islamisasi Ilmu-ilmu Konstemporer..*, hlm. 8.

³² Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hlm. 12.

juga berfungsi sebagai media dakwah. Dalam konteks itulah maka manajemen mutu kelembagaan PTM harus berdasarkan pada konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah, di mana misi dan tujuan PTM dirumuskan. Tanpa pemahaman terhadap konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah, PTM rentan dipengaruhi oleh berbagai ideologi pendidikan yang bertentangan dengan pendidikan Islam.

Proyek sekularisme tidak akan pernah berhenti dalam usahanya memisahkan agama dari sistem pendidikan. Oleh karena itu dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam, totalitas Iman, Ilmu, dan Amal harus dijadikan landasan teologis, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Mujadalah [58] ayat 11 berikut:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Allah mengangkat derajat orang-orang di antara kamu yaitu mereka yang beriman dan diberi ilmu pengetahuan, dan Allah mengetahui apa yang kamu amalkan.

Penelitian tentang Muhammadiyah sudah banyak dilakukan oleh para sarjana, baik dari kalangan Muhammadiyah sendiri maupun dari luar Muhammadiyah. Tetapi, penelitian mengenai “konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah dan implikasinya terhadap manajemen mutu perguruan tinggi Muhammadiyah” tampaknya masih langka. Di tengah kompetisi pelbagai ideologi pendidikan dan tantangan yang semakin kompleks, diperlukan refleksi pemikiran yang mendasar mengenai konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah, dan bagaimana konsep normatif tersebut diimplementasikan secara objektif dan empiris. Oleh karena itu, dalam penelitian disertasi ini saya mengajukan judul: “Konsep Pendidikan Tinggi Muhammadiyah dan Implikasinya terhadap Manajemen Mutu di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.”

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang, sebagaimana telah diuraikan di atas, masalah penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah belum sepenuhnya dapat terimplementasi dengan baik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Muhammadiyah.
2. Kebijakan mutu pendidikan tinggi nasional yang cenderung etatis memaksa perguruan tinggi Muhammadiyah harus mampu beradaptasi.
3. Belum ditemukannya model penjaminan mutu internal yang berpangkal pada karakteristik perguruan tinggi Muhammadiyah.

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Obyek penelitian disertasi ini dibatasi hanya pada: (1) konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah; (2) implementasi konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka; dan (3) implikasi konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah terhadap manajemen mutu di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka. Kurun waktu obyek penelitian dibatasi hanya pada tahun 2008–2018.

Rumusan masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah?
2. Bagaimana implementasi konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka?
3. Bagaimana implikasi konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah terhadap manajemen mutu di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah.
2. Menganalisis implementasi konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.
3. Menganalisis implikasi konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah terhadap manajemen mutu di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada sedikitnya tiga pihak berikut:

1. Akademisi

Kajian tentang konsep pendidikan tinggi Islam, oleh sarjana Muslim, secara sistematis dan komprehensif masih jarang dilakukan. Dengan pengecualian, yang ada hanyalah berupa percikan-percikan pemikiran tentang pendidikan tinggi Islam secara umum. Bagi komunitas akademis, dengan mengambil penelitian disertasi tentang Konsep Pendidikan Tinggi Muhammadiyah dan Implikasinya terhadap Manajemen Mutu di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka [2008-2018], diharapkan dapat: (1) ditemukan pemikiran konseptual Muhammadiyah tentang pendidikan tinggi Islam secara komprehensif dan sistematis yang, seharusnya mencakup komponen pokok pendidikan tinggi Islam, yang menjadi kerangka dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi Muhammadiyah; dan (2) menemukan implikasi dari implementasi konsep tersebut terhadap manajemen mutu di perguruan tinggi Muhammadiyah, khususnya di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.

2. Praktisi

Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi secara praktis bagi penyelenggara perguruan tinggi Islam, khususnya di perguruan tinggi Muhammadiyah. Informasi yang ditemukan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan yang diperlukan dalam mengelola sebuah perguruan tinggi Islam, terutama dalam konteks manajemen mutu.

3. Pemerintah

Mengingat perguruan tinggi Islam lahir dari pergumulan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menjadi harapan umat Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan korektif bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan tinggi, khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi Islam. Misi sosial-keagamaan perguruan tinggi Islam, terutama

yang diselenggarakan oleh masyarakat, dalam usahanya mencerdaskan kehidupan bangsa yang mayoritas Muslim, perlu didukung secara bijaksana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji “Konsep Pendidikan Tinggi Muhammadiyah dan Implikasinya terhadap Manajemen Mutu di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (2008-2018),” sebagai obyek penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan melalui observasi partisipasi (*participatory research*). Metode kepustakaan berarti membaca, mempelajari, memahami, dan menganalisis teks-teks maupun sumber data tertulis lainnya dari kepustakaan mengenai, dan yang terkait dengan, konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah dan implementasinya di UHAMKA. Observasi partisipasi dilakukan melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, di mana peneliti terlibat dalam rutinitas kegiatan pendidikan di UHAMKA. Wawancara dilakukan dengan beberapa unsur, yaitu dari unsur pimpinan, dosen, mahasiswa, karyawan, dan alumni UHAMKA. Dengan demikian, kombinasi metode studi kepustakaan dan studi lapangan tersebut dapat saling melengkapi.

Sumber data mengenai konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah berasal dari sumber-sumber tertulis, baik cetak maupun digital, yang resmi dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan oleh Majelis Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah, terutama mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi Muhammadiyah. Sedangkan data mengenai implementasi konsep tersebut di UHAMKA bersumber dari dokumen resmi UHAMKA, wawancara, dan observasi partisipasi. Data lainnya terkait dengan kebijakan pendidikan tinggi, dan yang berhubungan dengan perguruan tinggi Muhammadiyah, diambil dari sumber resmi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti), dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) baik cetak maupun digital.

Di lapangan, wawancara dilakukan di kampus dan di tempat acara kegiatan dilaksanakan. Setiap ada kegiatan rapat pimpinan, rapat dosen, rapat penjaminan mutu internal, penyusunan borang akreditasi program studi,

lokakarya, dan pembinaan al-Islam dan Kemuhammadiyah seperti kegiatan pengajian, Baitul Arqam maupun Darul Arqam, selalu terbuka kesempatan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Untuk mendapatkan sumber data dan informasi yang akurat, penulis melakukan konfirmasi kepada sumber yang pernah diwawancarai dan membandingkannya dengan sumber lain, baik melalui wawancara formal maupun wawancara informal. Sering kali wawancara yang dilakukan secara informal melalui dialog berlangsung lebih hangat dan terbuka, sudah tentu dengan tetap menjaga suasana akademik. Dengan demikian jelas bahwa penggunaan teknik triangulasi dalam wawancara ini memberi jaminan metodologis yang sah.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah: *Pertama*, pendekatan konsep pendidikan Islam, khususnya pendidikan tinggi Islam, yang diambil dari pemikiran para ahli, terutama dari kalangan intelektual Muslim, sebagaimana akan dijelaskan pada landasan teoretis. Untuk maksud tersebut, landasan teori yang digunakan mencakup komponen-komponen yang membentuk sistem pendidikan tinggi Islam (tujuan, kurikulum, manajemen, pendidik, mahasiswa, penelitian, penjaminan mutu, kegiatan, dan pembiayaan).

Kerangka teori pendidikan tinggi Islam tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah. Analisis dilakukan terhadap komponen yang membentuk sistem pendidikan tinggi Muhammadiyah: (1) Tujuan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, (3) Manajemen Pendidikan Tinggi Muhammadiyah (4) Pendidik dalam Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, (5) Mahasiswa dalam Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, (6) Penelitian dalam Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, (7) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, (8) Kegiatan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, dan (9) Pembiayaan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.

Kedua, analisis dilakukan terhadap implementasi konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah di UHAMKA. Analisis difokuskan pada kegiatan pendidikan atau pembinaan al-Islam dan Kemuhammadiyah yang menjadi ciri khas PTM. *Ketiga*, menganalisis implikasi konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah terhadap manajemen mutu di UHAMKA. Analisis dilakukan terhadap dua aspek,

yang pertama pada aspek manajemen mutu kelembagaan, dan yang kedua pada aspek manajemen mutu pendidikan al-Islam dan Kemuhammadiyah.

G. Penelusuran Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini: *Pertama*, adalah penelitian Ahmad Tafsir (1987) dengan judul “Konsep Pendidikan Formal dalam Muhammadiyah,” disertasi pada Fakultas Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah (sekarang UIN), Jakarta. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa “dalam garis besarnya konsep pendidikan SD, SMP dan SMA dalam Muhammadiyah sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai pula dengan kebutuhan rumah tangga dan masyarakat moderen.”³³

Menurut Tafsir, pada dasarnya kurikulum (bahan pelajaran) sekolah Muhammadiyah sama dengan kurikulum sekolah pemerintah. “Kurikulum yang khas Muhammadiyah ialah adanya bidang studi Al-Islam yang diperluas dan adanya bidang studi Kemuhammadiyah. Materi bidang studi Kemuhammadiyah itu adalah agama Islam menurut paham Muhammadiyah dan keorganisasian Muhammadiyah. Bidang studi Al-Islam yang diperluas berisi materi agama Islam yang lebih luas daripada materi bidang studi agama Islam dalam kurikulum pemerintah.”³⁴

Kedua, adalah penelitian Achmad Jainuri (1997) dengan judul *The Formation of the Muhammadiyah's Ideology 1912-1924*, disertasi pada The Institute of Islamic Studies McGill. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa menurut Muhammadiyah perhatian utama yang harus dilakukan adalah mereformasi dan merekonstruksi dasar pemahaman keagamaan. Prinsip dasarnya adalah bahwa iman dan ibadah memiliki implikasi sosial, bukan sekedar ritual saja. Ajaran Islam menyediakan basis teologis untuk melakukan gerakan reformasi sosial. Islam bukan teori, Islam adalah ajaran yang sempurna untuk dipraktekkan dalam tindakan nyata.³⁵

³³ Ahmad Tafsir. *Konsep Pendidikan Formal dalam Muhammadiyah*. Disertasi Doktor pada Fakultas Pascasarjana, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: tidak diterbitkan, 1987, hlm. 169.

³⁴ Ahmad Tafsir, *Konsep Pendidikan Formal dalam Muhammadiyah*. 1987, hlm. 165-166.

³⁵ Achmad Jainuri, *The Formation of the Muhammadiyah's Ideology 1912-1924*. Disertasi Doktor pada The Institute of Islamic Studies McGill University Montreal, May 1997, hlm. 196-199. <https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp02/NQ36987.pdf>, diakses Maret 2018.

Ketiga, penelitian disertasi Eko Supriyanto (2008) yang berjudul “Model Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Studi Multisitus pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah).” Penelitiannya bertujuan menemukan model penjaminan mutu khusus perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM). Kesimpulan dari penelitiannya menyebutkan bahwa, terdapat dua karakter proses pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di PTM. Menurutnya, pada kategori PTM yang sedang berkembang, pelaksanaan penjaminan mutu sebatas pada pelaksanaan ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) serta jumlah tatap muka yang dipersyaratkan, seperti banyak terjadi pada PT lainnya. Sedangkan pada kategori PTM yang lebih maju, menurut penelitian tersebut, penjaminan mutu dilakukan dengan cara membentuk lembaga penjaminan mutu (Penjamu) yang bertanggungjawab langsung pada proses akademik dan penguatan ideologi Muhammadiyah.³⁶

Keempat, adalah penelitian Ahmad Nur Fuad (2010) berjudul “Kontinuitas dan Diskontinuitas Pemikiran Keagamaan dalam Muhammadiyah (1923-2008): Tinjauan Sejarah Intelektual, disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini menemukan bahwa pemikiran keagamaan Muhammadiyah berjalan secara dialektis (kontinuitas-diskontinuitas) sesuai dengan tantangan sejarah. Terjadinya kontinuitas dan diskontinuitas tersebut merupakan suatu keniscayaan sejarah karena munculnya tantangan yang berbeda pada setiap episode dan *epoch* sejarah perkembangan Muhammadiyah. Dalam sejarah religio-intelektual Muhammadiyah dikenal adanya pemikiran keagamaan formal atau resmi (*official*) yang tertuang dalam berbagai dokumen organisasi sebagai produk dari forum pengambilan keputusan organisasi, seperti keputusan muktamar dan musyawarah *tarjih*. Pemikiran keagamaan resmi dihasilkan secara kolektif oleh ‘ulama melalui forum-forum resmi dan diformalisasikan secara kolektif (*jama’i*).³⁷

³⁶ Eko Supriyanto, *Model Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Studi multi situs pada Perguruan tinggi Muhammadiyah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah)*. Disertasi Doktor pada PPS Universitas Negeri Semarang, 2008. [online] <http://lib.unnes.ac.id/16856/1/1103603004.pdf>, diakses April 2018.

³⁷ Ahmad Nur Fuad, (2010) *Kontinuitas dan diskontinuitas pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah (1923-2008): tinjauan sejarah intelektual*. Disertasi Doktor pada PPS UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010, hlm. 326-329. <http://digilib.uinsby.ac.id/13/>, diakses April 2018.

Kelima, hasil penelitian Hamsah (2016) berjudul “Dasar Pemikiran Islam Berkemajuan Muhammadiyah 1912-1923,” tesis pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Muhammadiyah fase formatif sangat kuat pemihakannya pada pemulihan fungsi-fungsi akal. Ciri rasionalisme Muhammadiyah adalah terbuka, kritis, dan progresif. Sikap terbuka tersebut ditandai dengan kesediaan untuk melakukan dialog, menyerap kearifan yang lain, dan toleran terhadap kemajemukan dengan cara pandang Islam. Untuk itu, Muhammadiyah mendorong semangat kemajuan Islam di antaranya melalui jalan pendidikan.³⁸

Dari semua penelitian di atas, masing-masing memiliki keunggulan sesuai dengan pokok masalah yang ditelitinya, dan telah memberikan kontribusi pada komunitas akademik, khususnya bagi peminat kajian Muhammadiyah. Tetapi, tidak satu pun dari penelitian terdahulu yang mengkaji tentang konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah dan implikasinya terhadap manajemen mutu perguruan tinggi Muhammadiyah. Harus diakui, dari penelitian terdahulu terdapat beberapa persinggungan konsep, terutama pada aspek sejarah dan pemikiran Muhammadiyah. Terdapat satu penelitian tentang perguruan tinggi Muhammadiyah, yakni penelitian Eko Supriyanto (2008). Namun penelitian ini sama sekali tidak mengkaji tentang konsep pendidikan, meskipun yang diteliti adalah tentang mutu pendidikan. Dari penelitian terdahulu, informasi yang disampaikan dapat memperkaya perspektif untuk penelitian disertasi ini.

Dari semua penelitian terdahulu, sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang memiliki irisan konsep dengan penelitian disertasi ini, dan dapat dijadikan awal pijakan kerangka berpikir, adalah penelitian dari Ahmad Tafsir (1987). Meskipun penelitian Tafsir obyek studinya adalah tingkat sekolah (SD, SMP, dan SMA), tetapi prinsip dasarnya sama, yakni pendidikan Muhammadiyah. Bedanya penelitian disertasi ini dengan penelitian Tafsir, kecuali obyek studi pada jenjang pendidikan yang berbeda, pada penelitian Tafsir belum secara eksplisit mencakup manajemen mutu.

³⁸ F. Hamsah, *Dasar Pemikiran Islam Berkemajuan Muhammadiyah 1912-1923*, Tesis pada PPS UIN Alauddin Makassar, 2016, hlm. 129-130.

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1753/1/Hamzah%20F.pdf>, diakses April 2018.

Penelitian disertasi ini juga berbeda dengan penelitian Achmad Jainuri (1997). Penelitian Jainuri tidak menyinggung konsep dasar pendidikan Muhammadiyah. Penelitian Jainuri lebih pada penelitian tentang paham keagamaan, khususnya yang membentuk basis ideologi Muhammadiyah. Penelitian disertasi ini juga berbeda dengan penelitian Ahmad Nur Fuad (2010). Penelitian Fuad lebih pada penelitian tentang sejarah pemikiran Muhammadiyah, namun tidak sedikit pun menyinggung tentang pendidikan Muhammadiyah. Hal yang hampir sama terdapat pada Hamsah (2016), penelitian ini juga tidak bicara tentang konsep pendidikan. Penelitian Hamsah lebih menekankan pada konsep dasar pemikiran Islam yang berkembang, yang diusung oleh Muhammadiyah.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian disertasi ini, melalui obyek studi tentang “Konsep Pendidikan Tinggi Muhammadiyah dan Implikasinya terhadap Manajemen Mutu di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka” berusaha untuk menunjukkan pemikiran konseptual Muhammadiyah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam dan menemukan implikasinya terhadap manajemen mutu.

H. Kerangka Pemikiran

Menurut Wan Daud (2013), “konsep sebuah universitas, sama seperti konsep kunci (*key concept*) lainnya dalam Islam, harus mencerminkan semangat stabilitas dinamis. Dalam arti bahwa meskipun memiliki ciri-ciri dasar permanen tertentu, tetapi ia juga berisi prinsip-prinsip dan metode-metode yang memungkinkan untuk melakukan transformasi, dan adaptasi dengan situasi baru.”³⁹ Universitas, menurut Husaini (2018), adalah “tempat membentuk manusia yang “sempurna”, yang universal, integral, dan bukan manusia yang parsial.”⁴⁰ Dalam perspektif yang berbeda, menurut Durkheim, seperti dikutip oleh Hidayat (2016), universitas harus berperan dalam kehidupan moral yang menjadi basis pendidikan. Universitas tidak bisa melarikan diri dari peran dan tanggung jawab moral tersebut.⁴¹ Menurut Barnett dan Bengtson (2017),

³⁹ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Islamisasi Ilmu-ilmu Konstemporer...*, hlm. 42.

⁴⁰ Adian Husaini, *Pendidikan Islam, Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya 2045*, Depok: Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa, 2018, hlm. 42.

⁴¹ Rakhmat Hidayat, *Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 130.

universitas adalah tempat untuk menciptakan pengetahuan melalui riset, dan untuk memahaminya melalui pengajaran dan pembelajaran.⁴²

Mengutip pandangan Newman (1859) dalam bukunya *The Idea of a University*,^[43] Notohadiprawiro menjelaskan bahwa, “hakekat universitas adalah tempat mengajar dan belajar pengetahuan universal.” Karena itu menurut Newman, “pendidikan menjadi urusan primer suatu universitas. Pendidikan diselenggarakan untuk melatih pikiran, membentuk kebiasaan berpikir yang memiliki ciri-ciri kebebasan, kebijaksanaan, keadilan, kearifan, ketenangan, dan kesederhanaan yang bertahan selama hidup. Suatu universitas merupakan tempat orang dapat memperoleh pengetahuan banyak mengenai banyak sekali subyek.”⁴⁴

Menurut undang-undang dan ketentuan pemerintah, “pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.”⁴⁵ Sedangkan “perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.”⁴⁶ Perguruan tinggi dapat berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas.⁴⁷

Secara sosiologis, merujuk pada teori institusional organisasi, keberadaan suatu organisasi dipengaruhi oleh tekanan normatif, kadang muncul dari sumber luar seperti negara, pada waktu yang lain dapat muncul dari dalam organisasi itu sendiri. Dengan kata lain, keberadaan insitusi/organisasi dipengaruhi oleh lingkungan internal (teknis) maupun lingkungan eksternal (institusional).⁴⁸ Di sinilah pentingnya tata kelola dan manajemen organisasi untuk memudahkan

⁴² Ronald Barnett dan Soren Bengtson, “Universities and Epistemology: From a Dissolution of Knowledge to the Emergence of a New Thingking”. *Education Sciences*, 2017, (7), 38, hlm. 1-12.

⁴³ John Henry Newman. *The idea of a university*. The Project Gutenberg EBook, 2008.

⁴⁴ Tejojuwono Notohadiprawiro, “Universitas Pendidikan, Universitas Penelitian, Universitas Pelayanan Masyarakat, Ataukah Universitas Tridarma?”, FAFERTA UGM, 1997. http://faperta.ugm.ac.id/download/publikasi_dosen/tejoyuwono/pdf, diakses April 2018.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Bab 1 pasal 1, ayat 2

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Bab I, pasal 1, ayat 6.

⁴⁷ Lihat: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Bab I, pasal 1, ayat 7-12.

⁴⁸ Zucker, Lynne G., Institutional Theories of Organization, *Annual Review of Sociology*, Vol. 13. (1987), hal 443-464.

dalam pencapaian tujuan.⁴⁹ Tata kelola (*governance*) menjadi elemen penting untuk meningkatkan mutu di semua aspek pendidikan tinggi.⁵⁰

Misi perguruan tinggi (universitas), menurut Goddard (2005), adalah melaksanakan pengajaran (*teaching*), penelitian (*research*), dan pengabdian kepada masyarakat (*service to the community*). Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab sosial dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan kultural untuk penguatan komunitas lokal.⁵¹ Jadi, menurut sarjana Barat, kegiatan utama perguruan tinggi adalah menjalankan misi tersebut. Di Indonesia misi ini (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dikenal sebagai kewajiban tridharma perguruan tinggi.⁵²

Menurut Tafsir (2015),⁵³ dan dalam penelitian disertasi Tafsir (1987), pendidikan formal Islami sebagai suatu sistem mengandung lima komponen, yaitu (1) tujuan, (2) pendidik, (3) anak didik, (4) alat, dan (5) kegiatan.⁵⁴ Tafsir menjelaskan, bahwa alat pendidikan formal adalah semua benda dan bukan benda yang digunakan oleh pendidik dan anak didik dalam kegiatan pendidikan formal. Alat berupa benda sering disebut perangkat keras (*hard ware*) dan alat bukan benda sering disebut perangkat lunak (*soft ware*).⁵⁵ Sedangkan komponen pokok sebuah sistem pendidikan, menurut Coombs (1968:11), ada 12 (dua belas), yaitu: (1) tujuan, (2) siswa, (3) manajemen, (4) struktur dan jadwal, (5) konten/isi kurikulum, (6) pendidik, (7) alat belajar, (8) fasilitas, (9) teknologi, (10) penjaminan mutu, (11) riset, dan (12) biaya.⁵⁶

Faktor sukses perguruan tinggi (universitas) yang terpenting adalah tata kelola (*governance*). Tata kelola terkait dengan manajemen organisasi. Sebuah hasil riset menyebutkan bahwa di hampir seluruh universitas di Amerika Utara,

⁴⁹ Bandingkan, Tujuh Pokok Pikiran Penjelasan Muqadimah AD dan ART Muhammadiyah.

⁵⁰ Fabrice Henard dan Alexander Mitterle, *Governance and Quality Guidelines in Higher Education*, OECD: 2010, hlm. 15.

⁵¹ John Goddard, "Institutional Management and Engagement with the Knowledge Society. *Higher Educational Management and Policy*, Vol. 17, No. 1, 2005, hlm. 23-40.

⁵² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, (Pasal 1, Ayat 9).

⁵³ Lihat: Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hlm. 45.

⁵⁴ Ahmad Tafsir *Konsep Pendidikan Formal dalam Muhammadiyah*, Disertasi Doktor pada Fakultas Pascasarjana, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta; tidak diterbitkan, 1987, hlm. 14 dan 31.

⁵⁵ Ahmad Tafsir (1987). *Konsep Pendidikan Formal dalam Muhammadiyah*, hlm. 51.

⁵⁶ Coombs, Philip H. 1968. *The World Educational Crisis, A Systems Analysis*. Oxford University Press, hlm. 11.

cenderung menekankan pada identitas kelembagaan dan profesionalisme manajerial. Intinya adalah, menekankan bagaimana di satu sisi mengelola dosen (staf akademik), dan pada sisi lain adalah bagaimana mengelola aspek kelembagaan agar dapat berkembang. Pengalaman historis menunjukkan bahwa penerapan bentuk tata kelola perguruan tinggi berbeda-beda, bergantung pada misinya.⁵⁷

Secara historis, menurut Wan Daud, pendidikan tinggi Islam membangun visi dan program mereka di sekitar tokoh, ulama kharismatik. “Secara konseptual, pembentukan lembaga pendidikan tinggi Muslim sebagai mikrokosmos sebuah universitas Islam yang ideal tergantung pada pengalaman yang luas dan kemampuan multi-disiplin pemimpin tertinggi organisasi dan akademik.”⁵⁸ Kedudukan ulama, pendidik atau guru dalam pandangan Islam sangatlah tinggi, setingkat di bawah kedudukan nabi dan rasul.⁵⁹ Dengan demikian, manajemen mutu perguruan tinggi Islam, dan akhirnya mutu pendidikan tinggi Islam, sangat bergantung pada kompetensi pendidiknya

Berdasarkan perspektif pemikiran tersebut di atas, dan sesuai dengan kepentingan obyek studi dan tujuan penelitian ini, maka kerangka pemikiran yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian tentang “Konsep Pendidikan Tinggi Muhammadiyah dan Implikasinya terhadap Manajemen Mutu di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka,” dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kerangka pemikiran yang digunakan sebagai acuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah menggunakan 9 komponen pendidikan tinggi Islam, yaitu: (1) tujuan, (2) isi kurikulum, (3) manajemen, (4) pendidik, (5) mahasiswa, (6) penelitian, (7) penjaminan mutu, (8) kegiatan, dan (9) pembiayaan,
2. Kerangka pemikiran yang digunakan sebagai acuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR.

⁵⁷ Simon Marginson, “The Anglo-American University at Its Global High Tide”, *Minerva*, No. 44, No. 1, Maret 2006, hlm. 65–87.

⁵⁸ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Islamisasi Ilmu-ilmu Konstemporer..*, hlm. 43.

⁵⁹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hlm. 122.

Hamka menggunakan komponen-komponen yang membentuk konsep tersebut.

3. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menganalisis implikasi dari konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah terhadap manajemen mutu di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka menggunakan pendekatan kerangka konsep Manajemen Mutu, konsep modal intelektual, dan teori kelembagaan.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini akan menjelaskan mengapa penelitian tentang konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah dan implikasinya terhadap manajemen mutu di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka [UHAMKA] menarik dan penting dilakukan. Penjelasan dimulai dari: (A) Latar Belakang Masalah, (B) Identifikasi Masalah, (C) Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah, (D) Tujuan Penelitian, dan (D) Kegunaan Penelitian.

Selanjutnya, akan dijelaskan (E) Metode Penelitian, untuk menjelaskan jenis penelitian, pengumpulan data dan analisis data. Untuk memperoleh gambaran peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan, dilakukan kajian terhadap (F) Penelusuran Hasil Penelitian yang Relevan, sekaligus pada bagian ini akan dikemukakan posisi penelitian disertasi ini. Dari sinilah kemudian disusun: (H) Kerangka Pemikiran, yang menjadi acuan untuk penelitian dan penulisan disertasi. Bagian ini diakhiri dengan penjelasan terhadap (I) Sistematika Penulisan.

BAB II KONSEP PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

Bagian ini menjelaskan tinjauan teoretis yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Tinjauan teoretis atau kerangka teoretis sekaligus juga digunakan untuk melakukan analisis pada bagian pembahasan. Penjelasan teoretis dimulai dari (A) Tonggak Sejarah Pendidikan Tinggi Islam; (B) Definisi Pendidikan Tinggi Islam; (C) Komponen-komponen Pendidikan Tinggi Islam, terdiri atas: (1) Tujuan

Pendidikan Tinggi Islam, (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi Islam, (3) Manajemen Pendidikan Tinggi Islam, (4) Pendidik dalam Pendidikan Tinggi Islam, (5) Mahasiswa, (6) Penelitian dalam Pendidikan Tinggi Islam, (7) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Islam, (8) Kegiatan dalam Pendidikan Tinggi Islam, dan (9) Pembiayaan dalam Pendidikan Tinggi Islam.

BAB III KONSEP PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH DAN IMPLEMENTASINYA DI UHAMKA

Bagian ini menjelaskan tentang konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah secara sistematis. Penjelasan mencakup (1) Sejarah Pendidikan Tinggi Muhammadiyah; (2) Definisi dan Fungsi Pendidikan Tinggi Muhammadiyah; (3) Komponen Pendidikan Tinggi Muhammadiyah. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang konsep tersebut dan implementasinya di UHAMKA. Bagian ini mencakup: (1) Tentang UHAMKA; (2) Kegiatan Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di UHAMKA

BAB IV IMPLIKASI KONSEP PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH TERHADAP MANAJEMEN MUTU DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bagian ini membahas implikasi konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah terhadap manajemen mutu di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Pembahasan meliputi: (1) Implikasi terhadap mutu kelembagaan UHAMKA, (2) Implikasi terhadap mutu pendidikan/pembinaan AIK-UHAMKA.

BAB V KESIMPULAN

Bagian ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian. Pada bagian ini dipaparkan jawaban-jawaban dari pertanyaan penelitian disertasi ini. Kesimpulan mencakup jawaban tentang: (1) konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah; (2) Implementasi konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, (3) Implikasi konsep pendidikan tinggi Muhammadiyah terhadap manajemen mutu di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.